

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (UU SJSN No. 40 Tahun 2004). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia (UU No 24 Tahun 2011).

Kader JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan wujud dari partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program JKN dan diharapkan dapat mengoptimalkan sosialisasi, edukasi serta sebagai pengingat agar masyarakat mengikuti program JKN dan juga pendamping layanan. Kader JKN juga memiliki fungsi pemasaran sosial untuk mengubah perilaku masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta dan membayar iuran secara rutin. Peserta dan calon peserta JKN-KIS akan diberi edukasi melalui kunjungan-kunjungan agar lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban membayar iuran serta memahami pentingnya memiliki Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan, 2017).

Kader JKN berfungsi sebagai pengingat dan pengumpul iuran, baik kepada peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) yang aktif maupun menunggak. Kader JKN-KIS juga berprofesi sebagai agen PPOB (Payment Point Online Bank), sehingga jika peserta ingin melakukan pembayaran iuran bulanan dapat langsung melalui Kader JKN tersebut. Pada tahun 2017 terdapat 1.689 Kader JKN aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum kader JKN diterjunkan ke lapangan, setiap kader telah mendapatkan pelatihan / pembekalan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari kader JKN. Setiap kader mengelola kurang lebih 500 keluarga binaan di sekitar wilayah, yang rutin mereka kunjungi dan edukasi (BPJS Kesehatan, 2017).

Di kota Malang jumlah kader BPJS Kesehatan telah mencapai 94 kader. Jumlah kader yang ada di kecamatan turen sebanyak 3 kader. Kepala BPJS

Kesehatan cabang Malang menjelaskan setelah menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kolektabilitas iuran dan membantu cakupan kepesertaan program JKN-KIS, para kader mendapat evaluasi tiap dua minggu, selain evaluasi para kader diinfokan informasi terbaru tentang Program JKN-KIS serta membahas permasalahan yang dihadapi di lapangan. Disamping itu, para kader mempunyai wilayah binaan yang menjangkau sampai ke kecamatan dan desa (Jamkesnews, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti tentang gambaran kinerja kader jkn di kecamatan Turen kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran kinerja kader JKN di kecamatan Turen kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kinerja kader JKN di kecamatan Turen kabupaten Malang

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui demografi data kader JKN di kecamatan Turen
2. Untuk mengetahui fungsi kinerja kader JKN di kecamatan Turen

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Institusi

Sebagai tambahan referensi mengenai BPJS Kesehatan, dapat menjalin kerja sama yang lebih baik dengan BPJS Kesehatan, menjadikan jurusan kesehatan terapan lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas dan juga dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan

1.4.2 Bagi BPJS Kesehatan

Hasil laporan yang dilakukan dapat menjadi bahan masukan bagi BPJS Kesehatan

1.4.3 Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui secara lebih tentang gambaran kinerja kader jkn di kecamatan Turen kabupaten Malang.